

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Penelitian berjudul Relasi Kuasa Buruh dan Kekuasaan dengan fokus Strategi Gerakan Konfederasi Serikat Pekerja Pasca Orde Baru merupakan penelitian yang menarik, mengingat penelitian bertujuan untuk membandingkan strategi gerakan Konfederasi Serikat Pekerja dalam mewujudkan kepentingan. Selain membandingkan, penelitian berupaya merefleksikan keberhasilan dan kegagalan perjuangan Konfederasi Serikat Pekerja dalam mewujudkan kepentingan, tidak hanya itu judul ini diambil mengingat perjuangan kaum buruh di Indonesia memiliki strategi gerakan bervariasi terhitung sejak era kolonialisme hingga reformasi.

Pada era kolonialisme strategi perjuangan buruh menggunakan *interest group* dan *pressure group* melalui *Vereeniging voor Spoor-en Tramwegpersoneel* (VSTP) (1923) melakukan pemogokan atas kebijakan pemerintah kolonial, setelah merdeka gerakan buruh menggunakan *pressure group* dan *representative group* melalui Dewan Nasional bentukan pemerintah guna merepresentasikan kepentingan golongan masing-masing. Memasuki Orde Baru perjuangan buruh menggunakan strategi *representative group* melalui wadah tunggal Majelis Permusyawaratan Buruh Indonesia (MPBI), berbeda pasca Soeharto, gerakan buruh bangkit melakukan perlawanan menggunakan *pressure group*, *representative group* dan *political parties* dalam mewujudkan kepentingan kelas pekerja.

Selain itu penelitian turut mengulas posisi Konfederasi Serikat Pekerja terhadap kekuasaan dalam mewujudkan cita-cita pekerja, atas dasar tinjauan empiris penelitian menemukan Konfederasi Serikat Pekerja menggunakan ideologi pancasila dan Sosial Demokrat dalam mewujudkan kepentingan, sedangkan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia menggunakan Organisasi, Gerakan dan Politik sebagai strategi gerakan. Hal tersebut berbeda dengan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia menggunakan strategi Konsep, Lobi, Aksi dan Politik sebagai aktivitas gerakan mempengaruhi pemerintah dalam pengambilan keputusan. Gerakan Konfederasi Serikat Pekerja berupaya membangun kekuatan guna memperjuangkan kepentingan melalui demonstrasi, pemogokan umum, menutup akses transportasi dan terlibat dalam partai politik dalam rangka mewujudkan kepentingan di tingkat parlemen.

Penelitian sebelumnya berjudul “Strategi Perjuangan Serikat Buruh dalam Menuntut Kenaikan Upah di Kabupaten Jombang”, telah memotret perjuangan Serikat Buruh Plywood dan Gabungan Serikat Buruh Indonesia dalam menuntut pengupahan layak. Penelitian Hery Setyawan dan Mochamad Arif Affandi tersebut mengulas strategi yang digunakan serikat buruh dengan memadukan strategi internal dan eksternal sebagai solusi mewujudkan kesejahteraan serikat buruh, sedangkan teori yang digunakan berbasiskan konflik dalam melihat masalah pengupahan dipengaruhi oleh relasi produksi yang tidak seimbang antara buruh dan pengusaha di Kabupaten Jombang, (Setyawan & Affndi, 2017), meski demikian penelitian sebatas mengulas strategi gerakan dan tidak mengarah pada ideologi yang digunakan dalam melakukan perlawanan.

Penelitian kedua oleh (Amalia et al., 2023) berjudul “Dinamika Perjuangan KSPI dalam Menuntut Hak Kenakan UMP Tahun 2022”, penelitian melihat perjuangan KSPI menuntut kenaikan Upah Minimum Provinsi menggunakan Konsep, Lobi, demonstrasi dan mogok nasional sebagai strategi perjuangan yang dipengaruhi oleh kenaikan harga kebutuhan pokok yang tidak diikuti kenaikan upah (Amalia et al., 2023). Selain itu penelitian menggunakan teori gerakan sosial, mobilisasi sumber daya dan teori ketidakpuasan dalam melihat perjuangan KSPI, sedangkan metode yang digunakan deskriptif kualitatif melalui wawancara kepada pengurus konfederasi.

Berbeda dengan Yusnil yang mengulas “Peran Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Aceh dalam Membela Kaum Buruh di Kota Banda Aceh”, penelitian menemukan kenaikan Upah Minimum Provinsi ditetapkan Gubernur tidak layak memenuhi kebutuhan buruh, mengingat survei Komponen Hidup Layak tidak berimbang dengan kenaikan upah (Yusnil, 2017). Atas hal tersebut KSPI Banda Aceh berperan melakukan advokasi dengan pendidikan politik dan mengambil langkah litigasi dan non litigasi sebagai perlawanan menuntut hak pekerja. Metode yang digunakan ialah deskriptif kualitatif dengan menggali informasi kepada pengurus Dewan Perwakilan Daerah KSPI dan Dewan Pengupahan Provinsi Aceh.

Terlihat bahwa penelitian sebelumnya oleh Hery Setyawan dan Mochamad Arif Affandi sebatas memadukan strategi gerakan serikat buruh kabupaten Jombang dalam menuntut kenaikan upah, sedangkan penelitian (Amalia et al., 2023) berfokus pada perjuangan KSPI menuntut kenaikan UMP dengan strategi perlawanan organisasi mewujudkan kepentingan pekerja KSPI. Untuk itu

penelitian terkait Strategi Gerakan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia dan Konfederasi Serikat Pekerja pasca Orde Baru menjadi unik mengingat tujuan penelitian membandingkan strategi gerakan konfederasi yang belum pernah diteliti sebelumnya.

Studi gerakan Konfederasi Serikat Pekerja di Indonesia memiliki sudut pandang berbeda-beda, pertama sudut pandang mengarah pada politik yaitu gerakan buruh merupakan gerakan politik yang memiliki relasi kuat dengan partai politik. Pada Orde Baru (1966-1998) gerakan buruh semata-mata memperjuangkan kepentingan ekonomi, berbeda setelah Orde Baru gerakan buruh berbekal pandangan politik memperjuangkan kepentingan buruh yang bertumpu pada basis massa riil. Sebaliknya sebagian besar elemen buruh yang dianggap sebagai kekuatan utama memiliki kelemahan, hal tersebut terletak pada kontraproduktif manajemen organisasi buruh menggunakan perintah dari atas ke bawah yang memiliki efek negatif mengakibatkan kegagalan yang sistematis (Avril, 2016).

Pasca Orde Baru gerakan buruh mendapat perhatian dari banyak kalangan, narasi yang muncul gerakan buruh bukan gerakan yang utuh melainkan sebagai produk kebijakan otoriter Soeharto, akibatnya gerakan buruh terlihat terpecah belah dan tidak dapat memperjuangkan kepentingan sebagai kelompok yang utuh. Kehadiran kaum buruh dengan aksi protes menimbulkan rasa cemas yang mengakibatkan kurangnya rasa simpati meski kehadiran hanya sebatas menyampaikan tuntutan atas kehilangan pekerjaan dan kenaikan upah (Jordhus-Lier, 2017).

Gerakan buruh kerap disalurkan melalui aksi mogok yang berujung pada blokade jalan raya akibat dari penerapan kebijakan pasar bebas yang dianggap tidak berpihak kepada kaum buruh, kebijakan pasar bebas mengakibatkan krisis ekonomi dan menghilangkan status egaliter antar sesama buruh. Selain itu pasar bebas turut melegalkan bentuk privatisasi pada layanan pemerintah dan menerapkan persaingan di setiap sendi-sendi perekonomian (Edwards & Beech, 2016).

Di bawah kekuasaan Soeharto pembangunan ekonomi menjadi agenda besar dengan menjadikan stabilitas politik sebagai syarat utama, tidak heran jika tindakan represif turut dilakukan kepada gerakan baik di tingkat pusat hingga daerah dengan membredel media masa dan tindakan kekerasan tidak dapat dihindari, hal tersebut memicu para pekerja menciptakan suasana industri yang tidak kondusif dalam proses produksi. Di samping posisi kunci para pekerja memiliki kekuatan yang bertumpu pada asosiasi serikat pekerja (Rizzo & Atzeni, 2020) yang dapat mempengaruhi penetapan upah dan kebijakan di tingkat lokal (Perron, 2022).

Perjalanan kaum buruh sungguh memprihatinkan, pada pusran konflik (1825-1935) kaum buruh diperlakukan semena-mena dalam *cultuur stelse* (sistem tanam paksa) yang memberikan kerugian besar bagi pekerja, tidak hanya itu kebijakan politik liberal (*open door policy*) (1870) turut diterapkan dengan monopoli ekonomi dan tindakan eksploitasi tenaga kerja (Sulistyo, 2018). Negara-negara yang terlibat menangani masalah ketenagakerjaan yang menjadi bagian dari *International Labor Organization* (ILO) mengukuhkan kesepakatan yaitu para buruh bukan komoditas, ILO turut menetapkan hak antara lain yaitu hak ekonomi,

kesejahteraan dan kesempatan kerja yang layak bagi seluruh kaum pekerja. Kebijakan tersebut berbeda dirasakan pekerja Spanyol yang terus mengalami modifikasi akibat inovasi teknologi dan penerapan neo liberalisme, namun di tingkatan lebih rendah prosedur manajemen yang diterapkan dalam kerja memberikan hambatan perlawanan oleh kaum pekerja Spanyol (Riesgo Gómez, 2023).

Periode sebelumnya menunjukkan perusahaan barat tumbuh dan berkembang dalam bentuk perkebunan, seiring pertumbuhan perusahaan gerakan buruh meningkat tajam, hal tersebut berbeda dengan Amerika Serikat yang telah menjadi pusat investasi yang mengarah pada pembangunan infrastruktur yang dituangkan dalam program *new deal*. Pemerintah setempat memobilisasi sumber daya negara guna menciptakan akumulasi yang beriringan dengan krisis iklim, dengan demikian kaum pekerja menyepakati *green new deal* dengan alasan perlunya investasi skala besar guna mengurangi ketimpangan ekonomi, (Furnaro & Kay, 2022).

Ketimpangan ekonomi menjadi masalah utama mengakibatkan buruh Surabaya bergerak melakukan perlawanan hebat kepada pemerintah kolonial, buruh yang bekerja di sektor kereta api bergerak melakukan pemogokan dengan melibatkan 8.000 pekerja (Matanasi, 2020). Memasuki pertengahan 1923 pekerja kereta api terhimpun dalam *Vereeniging van Spoor-en Tramwegpersoneel* (VSTP) mengambil bagian dalam pemogokan terbesar di Jawa, sudut pandang historis menunjukkan gerakan buruh merupakan gerakan politik yang sejak kelahirannya memberikan perlawanan berarti bagi pemerintah kolonial melalui serikat buruh

revolusioner. Selain itu pekerja yang tergabung dalam Pekerja Rumah Tangga turun ke jalan menuntut hak sebagai pekerja, gerakan PRT berwatak politik telah mengorganisasikan diri di kota dengan mengusung isu masalah pekerja rumah tangga merupakan masalah perempuan yang melekat pada hak asasi manusia (Jordhus-Lier, 2017).

Sejak lahir kaum buruh dengan konsisten memperjuangkan hak normatif pekerja rumah tangga terkait upah dan kondisi kerja yang telah dirumuskan dalam hak asasi manusia, kaum buruh turut mengagas aturan-aturan penting terkait standar minimum pekerja dan perlindungan buruh migran. Di satu sisi kaum buruh sebagai gerakan sosial memiliki kelemahan yakni sebagai gerakan bersifat longgar memiliki tantangan tersendiri dalam memberikan analisis menggunakan narasi tradisional yang di dalamnya terdapat kesamaan perjuangan (Connor & Phelan, 2015).

Di tataran global gerakan buruh memperjuangkan hak yang telah diatur dalam konvensi organisasi dengan kampanye menargetkan perusahaan global (Connor & Phelan, 2015). Hal tersebut memiliki model kerja khas bagi pekerja transportasi yang diidentifikasi melalui tindakan kolektif pekerja, di tingkat dasar organisasi telah didesain yang menyebabkan rasa tidak nyaman dan tidak percaya diri dengan menempatkan sesama pekerja sebagai pesaing (Riesgo Gómez, 2023).

Pada era kemerdekaan kaum buruh mengambil bagian penting dalam pemogokan buruh di Surabaya diikuti dengan gerakan mengusir penjajah asing dari tanah air. Demonstrasi dan pemogokan terus dilakukan atas sikap pemerintah berkompromi yang memicu kaum buruh membentuk wadah perjuangan sebagai

kelompok oposisi dengan gagasan politik progresif. Politik progresif sendiri mencari ruang yang berkelanjutan guna mendistribusikan kekuasaan, sumber daya material yang lebih setara demi terwujudnya perubahan secara terstruktur. Gerakan progresif dibangun atas dasar penolakan terhadap kapitalisme dan peduli terhadap masyarakat global dengan memajukan kesadaran masyarakat dan kaum pekerja ke arah politis (Pattenden, 2023).

Setelah merdeka gerakan buruh progresif menemui kekalahan yang sistematis dikarenakan oleh kebijakan yang keliru, peristiwa demikian mengakibatkan kaum buruh memiliki sebaran anggota akar rumput perlahan melemah. Gerakan buruh menemui kegagalan dan berhasil ditangani oleh pemerintah yang pada akhirnya memberikan efek negatif dan kerugian besar bagi gerakan sosial (Prinada, 2022). Berbeda dengan gerakan buruh Eropa, kelompok progresif di Slovenia, Luksemburg dan Belgia mengambil kebijakan berbeda untuk tampil di panggung nasional guna memberikan kemenangan (Delwit, 2022).

Kaum buruh progresif yang telah gagal pada peristiwa Madiun bangkit dan tampil di atas panggung nasional melalui kebijakan Soekarno, lembaga yang diisi oleh kaum buruh mewakili ideologi dan golongan merepresentasikan kepentingan masing-masing. Kebijakan progresif menjadikan kaum buruh beradaptasi melalui formasi sosial dan gerakan politik kelas pekerja, sedangkan gerakan progresif kaum buruh yang mencakup desa dan perkotaan telah melampaui perbedaan ideologi dan golongan (Pattenden, 2023).

Kekalahan kaum buruh memiliki alasan mendasar, Patrick Diamond (2016) meninjau kekalahan elektoral (2015) di Inggris disebabkan oleh pemerintah koalisi

menciptakan suasana debat tidak seimbang, dengan demikian menguatkan persepsi bahwa kaum buruh bersalah atas krisis global. Di samping debat kaum buruh tidak memiliki napas yang cukup untuk menyampaikan pesan politik kepada masyarakat dikarenakan eratnya koalisi kelompok konservatif dan demokrat liberal, sehingga kekalahan kaum buruh disebabkan strategi yang mengakibatkan hilangnya kursi elektoral (Diamond, 2016).

Orde Baru dipimpin Soeharto memiliki komitmen kuat melaksanakan tujuan negara versi Orde Baru, selama tiga dekade berkuasa komitmen Soeharto berjalan pincang, Soeharto melakukan konsolidasi politik guna mempertahankan kekuasaan dengan berbagai cara (Angga & Anggraini, 2020). Slogan demokrasi pancasila membentuk penyederhanaan organisasi Majelis Permusyawaratan Buruh Indonesia (MPBI) dalam rangka mengontrol gerakan buruh. Pembentukan MPBI sebagai alibi politik tidak menunjukkan hasil positif, dengan demikian pemerintah mengambil langkah alternatif mendukung pembentukan Federasi Buruh Seluruh Indonesia (FBSI) dengan mekanisme organisasi berbentuk federasi yang menaungi serikat-serikat di bawahnya.

Selain mereduksi, pemerintah Orde Baru mengeluarkan paket kebijakan pada 1978 yang melemahkan daya beli kaum buruh hingga membangkitkan perlawanan yang tidak dapat dikendalikan. Tercatat sepanjang 1981 perlawanan dituangkan dalam bentuk mogok kerja melibatkan 145 pabrik diikuti oleh 30.464 buruh dan menyita 435.261 waktu produksi, dengan demikian pemerintah melalui Menteri Tenaga kerja mengubah FBSI menjadi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSPSI) (Kspsi, 2020). Upaya intervensi tersebut dilakukan sistematis dalam

rangka pembangunan iklim politik berbasis industri yang menjadi haluan Orde Baru, setidaknya bentuk intervensi dilakukan melalui pembentukan kantong buruh dan sablon palsu yang diatur melalui kebijakan dan manipulasi politik (Martha & Nasution, 2020).

Akibat gelombang reformasi gerakan buruh berkembang pesat melalui Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 5 Tahun 1998 dan diperkuat melalui Keputusan Presiden Nomor 83 untuk berdirinya serikat buruh. Atas dasar kebebasan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) memilih keluar dari Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), pilihan tersebut dalam rangka menentukan perjuangan buruh dengan mendorong dewan pengupahan menaikkan upah buruh menjadi 30%-35% guna mempertahankan daya beli kaum buruh (Cahyono, 2021).

Awal reformasi gerakan KSPSI dan KSPI menghadapi tantangan pasar bebas yang bersamaan dengan hadirnya *Multi National Corporation* (MNC), *World Bank* (WB) dan *World Trade Organization* (WTO) (Zuhdan, 2014). Tantangan serupa dialami kaum buruh mengakibatkan pengangguran meningkat tajam dan upah rendah yang berimbas pada kesejahteraan pekerja dalam pusaran pasar tenaga kerja (Sargent, 2023). Selain itu hadirnya Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 menjadi perhatian Konfederasi Serikat Pekerja sekaligus bumerang bagi pengusaha yang melanggar ketentuan Upah Minimum Provinsi.

Peristiwa tersebut beriringan dengan Konfederasi Serikat Pekerja yang menghadapi sistem kerja kontrak yang di legalisasi melalui aturan ketenagakerjaan, selain itu upaya menuntut kenaikan upah dituangkan dalam bentuk demonstrasi dan

pemogokan nasional (Syafitri, 2019). Perjuangan KSPSI dan KSPI tidak berhenti mempengaruhi kebijakan pemerintah terkait kontrak kerja dan outsourcing, gerakan tersebut diikuti dengan mogok kerja, mobilisasi kawasan industri yang memberikan efek peningkatan gerakan dalam bentuk politik perlawanan di pusat Ibu Kota.

Bangkitnya gerakan KSPSI dan KSPI sejalan dengan masif nya politisasi gerakan buruh, dapat dinilai kekuasaan telah berhasil mengaburkan gagasan melalui restrukturisasi dan tuntutan sebatas isu sosial dan ekonomi dalam rangka pemenuhan kesejahteraan buruh (Faedlulloh, 2019). Selain itu kehadiran *Labor Market Flexibility* (LMF) memberikan kebebasan pengusaha menggantikan pekerja demi keuntungan dalam skema interaksi bebas antara pengusaha dan pekerja. Skema demikian telah mereduksi perundingan kolektif, rekrutasi tenaga kerja dan upah yang berujung pada kerugian yang sistematis (Habibi, 2013).

Perjuangan Konfederasi Serikat Pekerja melalui demonstrasi dan mogok kerja menjadi langkah strategis di era reformasi, tuntutan konfederasi dinilai terjebak dalam isu yang sempit, namun sebaliknya perjuangan konfederasi bukan semata-mata memperjuangkan tuntutan bersifat tunggal (Zuhdan, 2014). Setidaknya perjuangan konfederasi mendapat empat hambatan dalam skema (LMF), pertama fleksibilitas external yaitu mempekerjakan buruh melalui kontrak tetap maupun sementara dengan penyesuaian pasar external, kedua fleksibilitas internal yakni mempekerjakan buruh dengan menyesuaikan waktu termasuk *part-time* di dalam nya, ketiga fleksibilitas fungsional yaitu mempekerjakan buruh dengan bidang pekerjaan berbeda, keempat fleksibilitas upah yaitu penerimaan

upah buruh ditentukan tidak secara kolektif, (Habibi, 2013). Skema demikian memicu konfederasi berjuang berbagai cara, gerakan tersebut melalui demonstrasi, komunikasi, lobi dan pemogokan umum guna menolak kebijakan yang merugikan pekerja (Amalia et al., 2023).

Strategi gerakan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia terlihat dinamis tatkala berhadapan kebijakan pemerintah, ketika kebijakan pengupahan dinilai merugikan pekerja KSPI mengambil langkah advokasi melalui pendidikan politik dan membentuk tim survei pengupahan layak (Yusnil, 2017), selain pendidikan politik, strategi gerakan litigasi dan non litigasi turut dilakukan sebagai bentuk perlawanan kebijakan pemerintah. Di waktu berbeda hadir kebijakan pengupahan Nomor 78 Tahun 2015 yang memicu perlawanan hebat KSPI. Tidak hanya itu, kehadiran Omnibus Law dan PP turunannya melengkapi penderitaan pekerja, dengan demikian perjuangan melalui strategi konsep dan lobi kembali ditempuh guna menghalau kebijakan pemerintah. Alhasil KSPI dan 11 inisiator konfederasi menghidupkan kembali partai buruh sebagai alat perjuangan kelas pekerja (Amalia et al., 2023).

Berbeda dengan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, tatkala menghadapi badai ketenagakerjaan KSPSI menekankan strategi lobi dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial, sedangkan strategi gerakan aksi dilakukan pada 2005-2006 memberikan kemenangan pekerja dalam Pemutusan Hubungan Kerja. Berbeda setelah satu dekade reformasi, gerakan buruh meningkat tajam menolak kontrak kerja dan outsourcing, KSPSI melakukan aksi mengusung

slogan *geruduk* pabrik berhasil mewujudkan kemenangan di tingkat pabrik, (Rahman Asrul et al., 2024).

Memasuki tahun 2021-2022 KSPSI menghadapi tantangan Omnibus Law Cipta Kerja, pemerintah memberlakukan UU Ciptaker yang memicu perlawanan KSPSI melalui aksi masa, lobi dan menggugat kebijakan ke Mahkamah Konstitusi (R. Abdullah et al., 2021). Tidak heran kehadiran Omnibus memangkas hak pekerja meliputi hilangnya ketentuan upah, pesangon, penghapusan sanksi pidana dan kemudahan pemutusan hubungan kerja (Habibah Zulaiha, 2022), dengan demikian KSPSI mengambil langkah sistematis melakukan perlawanan yang dinilai merugikan pekerja (R. Abdullah, 2021).

Gerakan buruh diuraikan dalam teori gerakan sosial, Karl Marx mengungkapkan dalam kehidupan sosial terdapat kelompok-kelompok yang saling berlawanan dan tidak dapat disatukan dalam kelas yang sama, terdapat kelompok yang saling berlawanan meliputi kaum penindas dan ditindas kaum borjuis dan proletar (Mills, 2022). Pertentangan antar kelompok akan meruncing akibat perkembangan masyarakat yang menuju perbaikan yaitu kehadiran kaum proletar pada puncak kekuasaan yang sebelumnya dikuasai oleh kelompok borjuis (Situmorang, 2019). Menurut Karl Marx perjuangan kelas sebagai senjata revolusi yang dituangkan dalam kesadaran gerakan sosial politik pekerja untuk keluar dari penindasan, perjuangan kelas akan tumbuh tatkala terjadi penderitaan berkepanjangan yang pada akhirnya melahirkan kesadaran revolusi.

Antonio Gramsci (sebagaimana dirujuk dalam Mansour Fakhri, 2010, h. 44-54) perubahan sosial meliputi seluruh elemen gerakan masyarakat sipil yang

memiliki kesamaan kepentingan untuk melakukan perubahan, hal tersebut dipengaruhi oleh interaksi seluruh aspek masyarakat melalui hegemoni kultural dan politik. Hegemoni sendiri merupakan bentuk kesadaran ideologis masyarakat sipil yang lebih dominan dari kelompok lain untuk menandingi dominasi borjuasi yang menggunakan perangkat politik guna mempertahankan kekuasaannya, dengan demikian masyarakat sipil patut dibebaskan dari hegemoni budaya kapitalis.

Menurut Sidney Tarrow (sebagaimana dirujuk dalam Hensmans & Bomel, 2018, h. 1) gerakan sosial merupakan aktivitas kolektif dipelopori masyarakat dengan tujuan dan solidaritas yang sama, gerakan sosial dituangkan melalui interaksi terus-menerus kepada elite maupun otoritas tertentu untuk mencapai perubahan dengan melibatkan diri dalam kontestasi. Sidney Tarrow (sebagaimana dirujuk dalam Sukmana, 2016, h. 14-15) tujuan gerakan sosial dicapai melalui bentuk aksi kolektif dari berbagai sisi dan berjuang memperebutkan sumber daya, sedangkan langkah strategis yang diambil kaum buruh membangun akar rumput, *pressure group* guna memperjuangkan kepentingan yang setara, sedangkan keterlibatan kaum pekerja dalam organisasi dilihat sebagai upaya strategis, terorganisir memiliki pengaruh positif dalam perubahan sosial (Hensmans & Bommel, 2018).

Berangkat dari pemaparan latar belakang, peneliti memfokuskan penelitian dengan judul “Relasi Kuasa Buruh dan Kekuasaan” (Strategi Gerakan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Pasca Orde Baru), sedangkan pokok-pokok rumusan masalah yaitu:

1.2. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana perbedaan strategi antara Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia dalam mewujudkan kepentingan pekerja?
- b. Faktor-faktor apa saja yang menjadi keberhasilan dan kegagalan gerakan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia dalam mewujudkan kepentingan pekerja?

1.3. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian memiliki tujuan yaitu:

- a. Untuk membandingkan strategi perjuangan yang digunakan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia pasca Orde Baru dalam mewujudkan kepentingan dan mengembangkan perjuangan yang digunakan oleh kaum buruh
- b. Untuk menganalisis faktor-faktor keberhasilan dan kegagalan perjuangan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia pasca Orde Baru dan memecahkan masalah yang dihadapi kaum buruh dalam mewujudkan kepentingannya.

1.4. Manfaat Penelitian

Pembahasan dari penelitian ini memiliki manfaat yaitu:

1.4.a. Akademik

Dengan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan baru bagi peneliti dan pembaca luas terkait perjuangan kaum buruh terutama dalam mengembangkan disiplin ilmu di ruang lingkup akademik.

1.4.b. Masyarakat Sipil

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi guna dikembangkan di berbagai ruang, bagi pegiat gerakan sosial dapat dijadikan sebagai referensi tambahan sedangkan bagi kaum buruh dapat digunakan sebagai langkah strategi gerakan dalam menyelesaikan masalah perburuhan di Indonesia.

1.5. Tinjauan Pustaka (Reviu Literatur)

Dalam tinjauan pustaka peneliti mengumpulkan literatur penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan isu dengan maksud dijadikan sebagai alat analisis, sedangkan kegunaannya ialah membantu mendalami temuan penelitian. Tinjauan pustaka tidak hanya mengumpulkan penelitian terdahulu melainkan dapat mengungkapkan perbedaan dan menemukan kebaruan dalam penelitian.

Pertama Penelitian Emmanuelle Avril (2016) berjudul “*Willful Blindness: Effects and Perceptions of New Labor’s Party Management*” mengungkapkan efek dan persepsi manajemen organisasi politik buruh memiliki tradisi partai yang rentan

terhadap budaya dan perilaku manajerial partai yang lambat laun menunjukkan sebagian besar anggota mengalami kebutaan dalam melihat roda internal organisasi. Para pemimpin organisasi politik turut salah dalam memaknai situasi eksternal partai dalam proses demokrasi atas dampak dari reformasi. Hasil penelitian menemukan adanya terobosan baru dalam pemahaman organisasi dialektika antara budaya organisasi dan reputasi organisasi buruh jauh lebih baik.

Menurut Avril gagasan tentang delegasi demokrasi dalam konferensi sesungguhnya tidak sesuai dan tidak sejalan, untuk itu kaum buruh seyogyanya memerlukan *new management* untuk mencapai hasil-hasil yang ideal dikarenakan manajemen partai belum terlepas atas kepentingan Toni Blair. Dalam supremasi Blair terdapat pemetaan kebangkitan serta kejatuhan proyek buruh, dari organisasi yang dikelola menunjukkan setiap elemen yang terlihat gagah di permukaan dan dianggap sebagai kekuatan nyatanya terdapat kelemahan cukup signifikan. Hal itu dapat dilihat dari hasil kontra produktif dari metode manajemen organisasi buruh baru yang tidak lain merupakan gaya manajemen perintah dan kontrol dari atas ke bawah (Avril, 2016).

Avril melakukan penelitian melalui observasi dan analisis mendalam terhadap partai buruh dengan menggabungkan pengalaman langsung dan pendekatan historis. Avril turut melakukan analisis terhadap data sekunder, namun pengumpulan data penelitian dilakukan hanya sebatas survei online.

Kedua penelitian oleh Hery Sertyawan dan Mochammad Affandi (2017) berjudul “Strategi Perjuangan Serikat Buruh dalam Tuntutan Kenaikan Upah di Kabupaten Jombang,” penelitian mengulas perjuangan buruh memiliki alasan

mendasar, kenaikan upah buruh tidak berjalan lurus dengan kesejahteraan ditandai dengan penetapan upah yang memukul mundur daya beli buruh. Sejak tahun 2012-2015 gerakan buruh berhasil memaksa pemerintah Jawa Timur menaikkan upah sebesar 25% yang dipicu oleh himpitan ekonomi yang mengarah pada jurang kemiskinan, meski kenaikan upah terbilang tinggi faktanya tidak dapat menopang kebutuhan pekerja dikarenakan kenaikan harga kebutuhan pokok meningkat tajam. Tidak heran gerakan buruh meliputi Serikat Buruh Plywood Jombang dan Gabungan Serikat Buruh Indonesia berjuang menuntut kenaikan upah menggunakan strategi organisasi.

Hasil penelitian menunjukkan konflik antara pengusaha dan kaum buruh kian meruncing tatkala menghadapi pengupahan, PHK, pesangon dan status kerja. Sejak tahun 2008 Serikat Buruh Plywood Jombang dan Serikat Buruh di PT. Sejahtera Usaha Bersama melakukan perjuangan menuntut pengupahan layak, status kerja dan outsourcing, mengingat perjuangan hak normatif menjadi kebutuhan dasar serikat buruh. Dalam melakukan perjuangan serikat buruh menggunakan dua strategi gerakan, pertama menggunakan strategi internal yakni melakukan konsolidasi dengan membawa hasil survei Komponen Hidup Layak. Selanjutnya hasil survei dituangkan dalam selebaran dan pamflet sebagai bentuk penyadaran massa, tidak hanya itu serikat buruh turut menggalang tanda tangan massal sebagai bentuk solidaritas perjuangan serikat buruh.

Selain internal perjuangan external turut dilakukan dengan membangun front persatuan meliputi elemen buruh, tani, mahasiswa dan masyarakat luas dengan mengampanyekan isu melalui media baik cetak maupun online. Setelah

persatuan dibentuk serikat buruh melakukan demonstrasi guna menekan pemerintah melalui dewan pengupahan kabupaten setempat. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengamatan fenomena meliputi aktivitas anggota Serikat Buruh Plywood Jombang dan Gabungan Serikat Buruh Indonesia, sedangkan analisis data menggunakan analisis interaktif melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Ketiga penelitian oleh Halaman Sam (2019) dengan judul “*Jeremy Corbyn and the War Machine: Assemblage and Affect in the 2015 Uk Labor Party Leadership Contest*” yang merupakan gambaran tentang kemenangan organisasi buruh. Sebelumnya gerakan buruh progresif di bawah kepemimpinan Tony Blair merupakan ide ketinggalan zaman dan di anggap gagal oleh partai konservatif, namun kehadiran Jeremy Corbin menjadi pemimpin partai buruh memberikan pukulan hebat bagi partai konservatif. Dari sudut pandang geografis elektoral kemenangan tidak dapat diraih, namun dibawah Jeremy Corbin dengan konsep mesin perang memberikan konseptualisasi dan antagonisme yang berhubungan langsung anggota buruh sebagai gerakan sosial untuk menentang dan mengubah negara.

Hasil penelitian menunjukkan kebangkitan Corbyn berhasil dijelaskan dengan sikap konsisten dan dapat berbagi kepada pendukungnya, oleh karenanya kampanye dan kemenangan Corbyn pada pemilihan 2015 memberikan perubahan dengan membentuk struktur, konektivitas, dan jalur institusi yang dimenangkan melalui kampanye media sosial. Corbyn mengubah pandangan publik menggunakan mesin perang, Corbyn turut membawa perubahan melebihi kuantitas

anggota yang sebelumnya dipimpin oleh Ed Miliband. Halaman Sam menguraikan kemenangan Corbyn dengan mesin perang merupakan kumpulan sosial tertentu yang di konsep menyerupai negara bersifat aktual maupun virtual.

Menurut Corbyn negara merupakan pelestarian organ kekuasaan, sedangkan mesin perang merupakan aparat negara, mengingat mesin perang memainkan peranan penting sebagai senjata dalam kampanye politik media sosial yang memiliki pengaruh signifikan. Peran dari media sosial dalam kampanye Corbyn ialah sikap antagonisme dalam pers arus utama, sedangkan keberhasilan kampanye melalui online tidak berdiri sendiri mengingat proses pemilihan tidak terlepas dari konsep mesin perang. Metode penelitian yang digunakan ialah kualitatif dengan wawancara mendalam dan pendekatan etnografi pada media sosial.

Keempat penelitian oleh Yusnil berjudul “Peran Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Aceh dalam Membela Kaum buruh di Kota Banda Aceh,” penelitian mengulas peran KSPI Aceh dalam memperjuangkan kepentingan buruh, mengingat upah minimum yang diterima jauh dari cukup sehingga belum memenuhi Kebutuhan Hidup Layak. Selain KHL, hak normatif buruh Aceh yang sebelumnya telah ditetapkan dalam UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 belum di realisasi, dengan demikian Konfederasi Serikat Pekerja Aceh mengambil peran melalui konsolidasi dan demonstrasi, mengingat konfederasi memiliki pengaruh dalam penetapan upah.

Hasil penelitian menunjukkan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Aceh berperan penting memperjuangkan pengupahan buruh yang jauh dari Komponen Hidup Layak, langkah yang diambil dengan melakukan advokasi, memberikan

pendidikan politik kepada Pimpinan Unit Kerja, tidak hanya itu KSPI turut memberikan bahan bacaan terkait hak normatif pekerja. Dalam melakukan pembelaan, KSPI menempuh langkah litigasi dan non litigasi melalui lembaga peradilan, membangun aksi masa guna mempengaruhi pengambilan keputusan.

Penelitian tersebut menggunakan deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif yakni menggambarkan masalah berdasarkan fakta lapangan bersifat khusus, selanjutnya bahan yang telah diteliti dilakukan penarikan kesimpulan bersifat umum. Penelitian difokuskan menganalisis praktik advokasi KSPI dalam penetapan upah sedangkan informan penelitian meliputi Ketua/Sekretaris DPD KSPI Aceh dan Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Aceh.

Kelima Penelitian oleh (Amalia et al., 2023) berjudul “Dinamika Perjuangan KSPI dalam Menuntut Hak Kenaikan UMP Tahun 2022”, penelitian menjelaskan kebutuhan hidup pekerja mengalami peningkatan dan berjalan lurus dengan kenaikan harga kebutuhan pekerja, di satu sisi dalam penetapan UMP yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi tidak dapat memenuhi kebutuhan buruh mengingat kenaikan upah terbilang kecil. Untuk itu KSPI melakukan berbagai cara guna mempengaruhi penetapan upah, langkah-langkah dilakukan melalui lobi, aksi masa dan mogok nasional, meski demikian usaha KSPI cenderung terabaikan.

Hasil penelitian menunjukkan perjuangan KSPI dalam menuntut kenaikan upah dikemas dalam strategi Konsep Lobi Aksi dan Politik, strategi konsep dilakukan dengan membedah kenaikan upah berdasarkan KHL yang nantinya akan dibawa kepada pemerintah melalui lobi politik. Apabila strategi konsep lobi tidak menemukan hasil maka strategi aksi ditempuh sebagai upaya mempengaruhi

penetapan Upah Minimum Provinsi, meski demikian upaya perjuangan KSPI cenderung terabaikan sehingga strategi politik ditempuh melalui Partai Buruh dengan maksud mempengaruhi pengambilan kebijakan di tingkat parlemen. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang berfokus pada dinamika KSPI dalam menuntut kenaikan UMP di tahun 2022, sedangkan teknik pengambilan data melalui wawancara kepada informan sebagai data primer dan dokumentasi berbentuk jurnal, artikel dijadikan sebagai data sekunder yang menunjang penelitian.

1.6. Kerangka Pemikiran

1.6.a. Konsep Gerakan Sosial

Dalam pandangan Karl Marx perjuangan kelas merupakan perjuangan yang menempatkan aksi-aksi kolektif dalam bentuk revolusi yang dituangkan dalam gerakan sosial dan politik kesadaran kelas, bentuk dari kesadaran kelas tidak lain dipimpin oleh pekerja dengan maksud melepaskan diri dari belenggu penindasan (Situmorang, 2019, h. 18). Perjuangan kelas hadir atas dasar keadaan sosial yang saling bertentangan antara satu sama lain yang tidak dapat didamaikan, terdapat kelompok penindas dan kelompok tertindas, kaum borjuis dan kaum proletar (Mills, 2022, h. 39) yang mengalami kontradiksi atas dasar perkembangan masyarakat.

Marx menguraikan, capaian dari perjuangan kelas dengan mengubah keadaan sosial melalui jalan revolusi sosialis yaitu kehadiran kaum proletariat pada puncak kekuasaan menggantikan kelas borjuis. Perjuangan kelas lahir tatkala

penghisapan dan penindasan memuncak dan pada akhirnya melahirkan kesadaran baru memicu bangkitnya gerakan kelas pekerja,

“It is not the consciousness of men that determines their existence, but their social existence that determines their consciousness” (Aribowo, 2022, h. 18).

Marx memandang konflik kelas merupakan perlawanan terhadap ketimpangan sosio-ekonomi dari sistem kapitalisme, sedangkan bentuk perlawanannya merupakan gerakan sosial yang dipelopori oleh kelas pekerja sebagai agen pembebasan dan emansipasi manusia.

Antonio Gramsci mengungkapkan gerakan sosial (overdeterminasi) tidak hanya bertumpu pada satu elemen, melainkan seluruh elemen masyarakat sipil yang memiliki kesamaan kepentingan yang dipengaruhi oleh interaksi seluruh aspek masyarakat dituangkan dalam hegemoni kultural dan politik, (Fakih, 2010). Overdeterminasi sendiri menolak anggapan bahwa kompleksitas pertentangan dalam masyarakat sipil dapat disederhanakan dalam bentuk sebab dan akibat *base structure* mengingat setiap unsur dalam peristiwa pertentangan memainkan peran tersendiri dalam menentukan peristiwa tersebut.

Hegemoni merupakan bentuk kesadaran ideologis masyarakat sipil yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari yang lain, sehingga dapat berfungsi sebagai antitesis dominasi budaya borjuasi yang menggunakan perangkat politik guna mempertahankan kekuasaannya. Lebih jauh, hegemoni merupakan bentuk kontrol dan kekuasaan yang bersifat hegemonik melalui persetujuan yang meliputi beberapa jenis penerimaan intelektual atas tatanan ekonomi sosial dan politik yang ada.

Menurut Sidney Tarrow (sebagaimana dirujuk dalam Hensmans & Bommel, 2018, h. 1) gerakan sosial merupakan tindakan kolektif oleh masyarakat didasari kesamaan tujuan, hal tersebut dilihat dari bentuk solidaritas yang sama dengan cara interaksi berkelanjutan terhadap elit, maupun otoritas tertentu guna mewujudkan perubahan dengan melibatkan diri dalam kontestasi. Sidney Tarrow (sebagaimana dirujuk dalam Sukmana, 2016, h. 14-15) tujuan gerakan sosial dicapai melalui bentuk aksi kolektif dari berbagai sisi dan berjuang memperebutkan sumber daya, pada dasarnya gerakan sosial mendapatkan pengaruh dan menjalankan aktivitasnya dengan memanfaatkan komunikasi strategis, dengan demikian gerakan yang relatif kecil diisi oleh orang-orang luar bermaksud menentang petahana dapat menarik perhatian publik, menciptakan reputasi, dan mendapatkan legitimasi dari pemangku kepentingan.

Gerakan sosial merupakan rangkaian perlawanan yang ditampilkan melalui aksi, pertunjukan yang dilakukan oleh masyarakat berdasarkan *collective claims* ditunjukkan kepada pihak tertentu. Gerakan sosial sebagai upaya masyarakat dalam berpartisipasi di ruang politik, pada praktiknya gerakan sosial berfokus pada individu, organisasi dan peristiwa yang saling berhubungan meliputi globalisasi, neo liberalisme dan berubah menjadi bentuk partisipasi sosial politik (Della Porta & Diani, 2015). Gerakan sosial diawali dengan konsep sehingga dapat memperoleh batasan-batasan yang telah ditentukan, di samping konsep gerakan sosial turut memiliki kekuatan yang bertumpu pada perspektif.

Tradisi gerakan sosial memiliki kecenderungan melihat fenomena tingkah laku masa yang tidak terorganisir (Joni Rusmanto, 2018) namun memiliki tipe

perilaku bersifat kolektif. Menurut Spencer (sebagaimana dirujuk dalam Sukmana, 2016, h. 14) tindakan kolektif diartikan sebagai tindakan yang mengubah kedudukan kekuasaan akibat pengaruh kelompok tertentu yang dilakukan dengan cara kerumunan, kerusuhan, penolakan yang diorganisasikan dengan maksud mewujudkan perubahan sosial, upaya tersebut sebagai tindakan kolektif untuk meninggalkan tatanan lama menuju pada tatanan baru.

Selain itu gerakan sosial sebagai upaya perlawanan kolektif masyarakat yang memiliki kesamaan solidaritas dan tujuan dengan interaksi kepada elite, pihak berwenang maupun lawan. Untuk itu gerakan sosial diidentifikasi menjadi (1) Suatu gerakan yang menentang elite, otoritas, aturan, kelompok maupun sistem. (2) Gerakan yang dilakukan atas nama klaim yang sama terhadap lawan, elit dan pihak berwenang. (3) Suatu gerakan yang didasari oleh kesamaan identitas. (4) Tindakan kolektif perlawanan dilakukan dalam bentuk sosial, sebaliknya gerakan sosial dalam bentuk mogok kerja, unjuk rasa dipengaruhi oleh hubungan kerja yang tidak harmonis, hal tersebut merupakan dampak dari tuntutan yang diabaikan sehingga melahirkan konflik yang saling bertentangan.

Charles Tilly menguraikan perlawanan politik (*Contentious Politics*) gerakan sosial memiliki tiga landasan fundamental yaitu (1) Kampanye merupakan upaya pengorganisasian publik yang dilakukan dengan intens dalam bentuk tuntutan bersama ditujukan kepada pihak yang memiliki otoritas. (2) Gerakan Sosial (*repertoire*) merupakan rangkaian dari aktivitas dan tindakan instrumen politik oleh gerakan sosial. (3) Keikutsertaan publik yang terpadu sebagai wujud gerakan sosial yang memiliki keseriusan sikap yang diterapkan dalam kesamaan

atribut dan kehadiran kelompok masyarakat, keseragaman atribut ditunjukkan melalui kesamaan suara, spanduk tuntutan, jumlah masa dan keikutsertaan melalui gerakan perlawanan sosial.

1.6.b. Mobilisasi Sumber Daya dan Proses Politik

Mengikuti gagasan Sidney Tarrow (sebagaimana dirujuk dalam Hensman, 2018, h. 1) mobilisasi sumber daya merupakan bentuk gerakan sosial dengan maksud resolusi rasional dan strategi dari keluhan kelompok sosial, mobilisasi sendiri dipimpin secara efektif dengan memobilisasi keahlian, pendanaan, fasilitas pengorganisasian, media dan teknologi yang berfokus pada pembentukan massa untuk mencapai tujuan. Menurut Klandermans (sebagaimana dirujuk dalam Sukmana, 2016, h. 172) mobilisasi sumber daya didasari oleh faktor struktural yaitu ketersediaan sumber daya untuk kolektivitas, individu dan berpartisipasi dalam relasi sosial, sedangkan partisipasi dalam jaringan sosial merupakan hasil dari proses keputusan rasional yang dilakukan oleh orang-orang melalui perhitungan tertentu. Faktor-faktor menentukan mobilisasi sumber daya yaitu

1. Organisasi gerakan sosial yang kompleks mengidentikkan tujuannya dengan preferensi gerakan sosial dan berusaha mewujudkan tujuannya, selain itu sebagai asosiasi bagi orang-orang yang melakukan tuntutan moral terkait kehidupan personal atau kelompok tertentu.
2. Pemimpin dan kepemimpinan berfungsi memberikan inspirasi, mengorganisasikan orang-orang terlibat dalam gerakan sosial guna mempengaruhi hasil keputusan, selain itu komitmen yang kuat dalam

melakukan mobilisasi sumber-sumber, memahami peluang dan menciptakan kesempatan, menyusun strategi dan membingkai tuntutan bersama.

3. Partisipasi dan jaringan meliputi individu maupun kelompok menjadi sentral gerakan sosial kolektif, sehingga orang-orang yang terlibat di dalamnya dapat menciptakan perubahan sosial.

Mengikuti pandangan Sydney Tarrow (sebagaimana dirujuk dalam Sukmana, 2016, h. 201) terdapat faktor adanya peluang politik yaitu (1) Keterbukaan dari lembaga politik. (2) Stabilitas hubungan dari kelompok yang berkuasa. (3) adanya persekutuan jaringan elit yang berkuasa dan masyarakat. (4) adanya kecenderungan tindakan represif yang dilakukan negara. Sidney Tarrow menjelaskan peluang politik hadir sehingga lahirnya gerakan sosial dikarenakan oleh: (1) kebijakan pemerintah tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat, selain itu aspirasi cenderung diabaikan oleh pemerintah. (2) Kesempatan khusus kelompok yaitu perubahan yang dialami oleh kelompok tertentu dan menimbulkan aksi kolektif dikarenakan oleh faktor politik, ekonomi, ideologi dan budaya.

1.6.c. Keberhasilan dan Kegagalan Gerakan Sosial

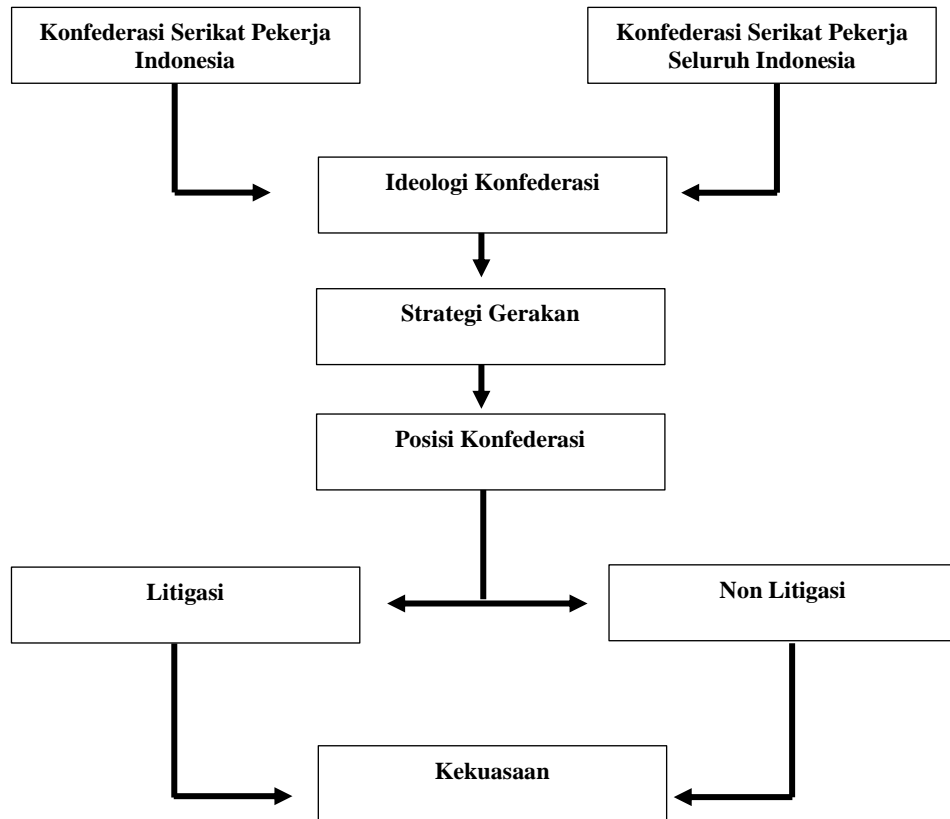
Menurut Sidney Tarrow (sebagaimana dirujuk dalam Hensman, 2018, h. 1) gerakan sosial berfokus pada perilaku individu dan berubah menjadi tindakan kolektif yang memiliki tujuan perubahan sosial diikuti oleh tindakan strategis, rasional dan satu tujuan. Sebaliknya individu kelompok kolektif dijadikan sebagai bentuk perilaku massa dan kerusuhan sosial bersifat negatif, irasional, mengganggu

dan mengancam nilai tatanan sosial yang ada. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan diungkapkan oleh Manuel Castel (sebagaimana dirujuk dalam Sukmana, 2016, h. 33) yaitu gerakan sosial masyarakat perkotaan mengartikulasikan tujuan dasar yaitu: (1) kemampuan meningkatkan konsumsi kolektif. (2) Kemampuan menciptakan budaya masyarakat yang otonom independen. (3) Kemampuan mengelola politik secara mandiri, sedangkan keberhasilan dan kegagalan gerakan sosial dapat dipengaruhi oleh:

1. Kepemimpinan yang efektif yaitu individu memahami sistem hukum dan politik yang berlaku, pemimpin gerakan sosial berfokus pada tugas-tugas yang diperlukan guna mencapai tujuan bersama.
2. Citra positif yaitu gerakan sosial berusaha meyakinkan semua pihak termasuk pemegang otoritas guna menginginkan kebenaran. Keberhasilan gerakan sosial terwujud apabila mendapat respek dari perjuangan gerakan sosial.
3. Taktik yang dapat diterima oleh umum dan diyakini efektif mencapai tujuan sehingga memberikan dampak pembentukan citra positif publik.
4. Gerakan sosial meyakinkan masyarakat tentang tujuan dan dapat diterima secara sosial yang didasari oleh kepentingan dan tidak memberikan kerugian.
5. Dukungan politik dan finansial yaitu perpaduan teknik dan pesan gerakan sosial guna memperoleh dukungan dari jaringan maupun kelompok organisasi.

Bagan.1. 1

Kerangka Pemikiran Teoritis



1.7. Definisi Konseptual

Dalam bagian ini peneliti menggunakan beberapa konsep antara lain yaitu:

a. **Kelompok Kepentingan**

Merupakan kelompok masyarakat yang memiliki tujuan untuk mempengaruhi keputusan politik dengan meyakinkan pengambil keputusan untuk bertindak sesuai dengan kepentingan kelompoknya.

b. Kaum Buruh

Buruh merupakan orang yang bekerja di pabrik untuk orang lain dengan maksud mendapatkan upah, pekerja merupakan orang yang bekerja atau orang yang menerima upah atas hasil kerjanya. Karyawan merupakan orang yang bekerja di lembaga, kantor dengan maksud mendapatkan gaji (upah)

c. Strategi

Strategi merupakan rencana tindakan yang dilakukan baik bersifat jangka pendek dan jangka panjang untuk mencapai kepentingan yang telah ditetapkan.

d. Kekuasaan

Kekuasaan ialah hubungan antara individu dan sekelompok individu dalam hal menentukan tindakan agar sesuai yang dikehendaki oleh pihak tersebut.

1.8. Metode Penelitian

1.8.a. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu bertumpu pada studi kasus dengan mengamati fenomena yang terjadi dan mendalami substansi dibalik fenomena tersebut. Menurut Creswell penelitian kualitatif merupakan proses penyelidikan pemahaman berdasarkan pada tradisi metodologi dan mengeksplorasi masalah sosial maupun manusia. Penelitian kualitatif dapat dibedakan berdasarkan ukuran atau batasan yaitu melibatkan individu, kelompok, keseluruhan program atau aktivitas (Creswell & Creswell, 2018). Menurut Bennett & Elman (sebagaimana dirujuk dalam Syafrida, 2022 h. 41) penelitian kualitatif memiliki

keunggulan komparatif yakni dalam pengembangan penelitian dengan konsep yang valid, sedangkan secara definisi penelitian kualitatif merupakan pemaknaan mendalam terhadap fenomena dengan detail pada tiap-tiap kasus, mengingat penelitian kualitatif memiliki data bersifat akurat dan lengkap terdiri dari data primer dan sekunder (Syafrida, 2022).

Secara umum penelitian kualitatif menggunakan observasi, analisis visual, studi pustaka dan interview (Creswell & Creswell, 2018). Jenis penelitian ini menggunakan kualitatif, penelitiannya bersifat holistik yang melakukan pemeriksaan mendalam terhadap suatu fenomena. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi kepada objek yang hendak diteliti, selanjutnya peneliti melakukan wawancara langsung dan mendalam kepada subjek yang telah ditentukan yaitu pengurus Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah Istimewa Yogyakarta, Pimpinan Unit Kerja PT. Indonesia Growth Projects Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia.

Teknik wawancara turut dilakukan kepada pengurus Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia meliputi Pengurus Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah Jawa Tengah, Pimpinan Unit Kerja PT. Ciubros Farma. Selain wawancara teknik pengumpulan data melalui dokumentasi berupa dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Data yang telah dikumpulkan dilakukan reduksi dengan mengambil/mengelompokkan data dinilai penting, selanjutnya menyajikan data berupa kumpulan informasi lapangan dan melakukan penarikan kesimpulan sebagai langkah terakhir dalam teknik analisis data.

1.8.b. Ruang Lingkup Penelitian/Fokus

Dalam ruang lingkup peneliti membahas terkait ideologi yang digunakan Konfederasi Serikat Pekerja dalam mewujudkan kepentingan, strategi gerakan yang digunakan dalam berjuang, pola gerakan Konfederasi Serikat Pekerja, posisi Konfederasi Serikat Pekerja terhadap kekuasaan dan faktor-faktor yang menjadi penyebab kegagalan dan keberhasilan Konfederasi Serikat Pekerja dalam berjuang. Selain itu peneliti melakukan analisis mendalam terhadap poin-poin yang menjadi fokus dari penelitian.

1.8.c. Fenomena Penelitian

Relasi Kuasa Buruh dan Kekuasaan (Strategi Gerakan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia pasca Orde Baru) memiliki fenomena menarik yang menjadi landasan dalam melakukan penelitian, *pertama* terdapat perbedaan strategi gerakan buruh dari fase ke fase dalam mewujudkan kepentingan, pada era kolonialisme perjuangan kaum buruh menggunakan *interest group* dan *pressure group*, sedangkan di bawah kekuasaan Orde Lama perjuangan kaum buruh menggunakan *representative group* dan *pressure group* dalam Kabinet Karya dan Dewan Nasional. Memasuki Orde Baru perjuangan kaum buruh menggunakan *representative group* melalui wadah tunggal Majelis Permusyawaratan Buruh Indonesia (MPBI).

Berbeda setelah Orde Baru perjuangan buruh dilakukan dengan memosisikan Konfederasi Serikat Pekerja sebagai kelompok penekan guna mewujudkan kepentingan, selain itu perjuangan turut dilakukan menggunakan

partai politik sebagai kendaraan mewujudkan kepentingan pekerja. *Kedua* terdapat perbedaan strategi perjuangan dalam mewujudkan kepentingan pekerja, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia menggunakan strategi Organisasi, Gerakan dan Politik, sedangkan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia menggunakan strategi gerakan berupa strategi Konsep, Lobi, Aksi dan Politik sebagai upaya mewujudkan kepentingan pekerja.

1.8.d. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini memiliki dua jenis sumber yaitu:

1. Data Primer

Data Primer merupakan data utama yang digunakan oleh peneliti, data tersebut diperoleh melalui observasi secara langsung dan melakukan wawancara terhadap pengurus inti dari pengurus Konfederasi Serikat Pekerja yang dinilai berkompeten dalam memberikan informasi.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung dalam menunjang penelitian, data sekunder dikumpulkan melalui buku yang berkaitan perjuangan dan dokumen berupa Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Konfederasi Serikat Pekerja. Selain itu data sekunder berupa jurnal, media online, media cetak dan laporan penelitian terdahulu digunakan sebagai penunjang penelitian.

1.8.e. Pemilihan Informan

Pemilihan informan berdasarkan purposive yaitu kepada orang-orang yang dianggap kompeten dalam memberikan informasi, orang-orang tersebut yang hendak dijadikan sebagai informan adalah pengurus Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Pimpinan Unit Kerja PT. Indonesia Growth Projects Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, sedangkan informan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia meliputi Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah Jawa Tengah, Pimpinan Unit Kerja PT. Ciubros Farma.

Tabel 1. 1

Informan Penelitian Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia

No	Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia	
	Jabatan	Nama
1.	Wakil Sekretaris Jenderal	Ferri Nuzarli
2.	Ketua DPD DIY	Kirnadi
3.	Sekretaris Jenderal DPD DIY	Irsad Ade Irawan
4.	Anggota PUK. PT. (IGP)	Pendi Yuli Anto
5.	Anggota	Taufik Hidayat
6.	Anggota	Yohanes Agus
7.	Anggota	Candra J. Lambang
8.	Anggota	Galih Prasetya
9.	Anggota	Tridartianto
10.	Anggota	Agung Purnomo
11.	Anggota	Galih Eko
12.	Anggota	Prakoso
13.	Anggota	Dino Wahid Prasetya
14.	Anggota	Triyanto

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2023.

Tabel 1. 2

Informan Penelitian Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia

No	Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia	
	Jabatan	Nama
1.	Bidang Politik dan Kebijakan Publik	Riden Khatam Aziz
2.	Bidang Pendidikan dan Pelatihan	Sulaiman Ibrahim
3.	Sekretaris Jenderal DPD Jawa Tengah	Zainudin
4.	Bidang Organisasi	Lukmanul Hakim
5.	Anggota	Ulfatul
6.	Anggota	Rukaya
7.	Anggota	Uni Tegowati
8.	Anggota	Alfia
9.	Anggota	Tumia
10.	Anggota	Sofiatun
11.	Anggota	Mustamiro
12.	Anggota	Masria
13.	Anggota	Aliroh
14.	Anggota	Nur hidayati

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2023.

1.8.f. Instrumen Penelitian

Dalam instrumen penelitian memerlukan alat bantu dalam proses pengumpulan data, alat bantu dalam penelitian meliputi pedoman wawancara dan perekam suara. Selain itu peneliti menggunakan fotografi kamera dan laptop sebagai alat bantu guna mempermudah penelitian.

1.8.g. Teknik Pengumpulan Data

Merujuk pada John W. Creswell (2018) teknik pengumpulan data merupakan peran peneliti menata informasi yang berkaitan penelitian melalui Observasi, Wawancara dan Dokumentasi.

1. Observasi

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi dengan mengamati fenomena di lapangan, membuat dan mengumpulkan catatan lapangan mengenai aktivitas Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Dalam catatan lapangan peneliti mencatat poin-poin penting bersifat terstruktur dengan mengajukan pertanyaan yang sebelumnya tidak diketahui oleh peneliti. Selain itu peneliti turut melakukan observasi kepada narasumber dengan maksud mengamati aktivitas narasumber.

2. Wawancara

Pengambilan data dilakukan melalui wawancara bersifat langsung dan mendalam kepada pengurus Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia meliputi Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah dan Pimpinan Unit Kerja Daerah Istimewa Yogyakarta, sedangkan wawancara kepada Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia meliputi pengurus Dewan Pimpinan Pusat, DPD dan PUK di Jawa Tengah, sedangkan periode wawancara dilakukan sejak 12 September 2023 hingga 24 Januari 2024. Selanjutnya wawancara dilakukan dengan memberikan pertanyaan bersifat struktur yakni pertanyaan wawancara telah dipersiapkan sebelumnya melalui kisi-kis pertanyaan. Peneliti memberikan pertanyaan yang sama dengan maksud memperoleh jawaban langsung kepada pengurus Konfederasi Serikat Pekerja.

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data berupa dokumentasi digunakan untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan penelitian, sebelumnya peneliti telah mengelompokkan data berupa buku dan arsip konfederasi meliputi Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, jurnal internal dan hasil keputusan Kongres Konfederasi, selain itu dokumen berupa jurnal turut digunakan terutama mengulas strategi perjuangan konfederasi, peneliti juga menggunakan laporan-laporan lain dengan maksud mendukung penelitian.

1.8.h. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian memerlukan teknik dalam menganalisis data bersifat primer maupun sekunder, teknik analisis data merupakan proses mencari dan menyusun data dengan sistematis terhadap data yang telah diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan deskriptif analitis dengan maksud menggambarkan objek penelitian yaitu Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, data-data telah dikumpulkan kemudian dihubungkan dengan kajian teori sehingga menjadi kesimpulan bersifat utuh. Adapun langkah-langkah analisis data yaitu:

1. Reduksi Data

Dalam langkah ini data-data yang telah dikumpulkan berupa catatan lapangan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi kemudian dibahas dengan maksud menarik kesimpulan. Dalam reduksi peneliti melakukan

abstraksi dan merangkum hal bersifat penting, melakukan pengelompokan dan pendalaman terkait strategi perjuangan Konfederasi Serikat Pekerja, tidak lupa peneliti menyederhanakan data menjadi sempurna dengan maksud memudahkan pembaca memahami penelitian.

2. Penyajian Data

Data yang telah direduksi dari kegiatan lapangan berupa observasi dan wawancara selanjutnya ditampilkan dalam bentuk sederhana dan dikaji dengan menggunakan teori-teori yang menjadi landasan penelitian. Tahap ini dilakukan mengingat data yang diperoleh melalui hasil lapangan bersifat naratif, sehingga memerlukan penyajian dalam bentuk sederhana tanpa mengurangi substansi hasil penelitian.

3. Interpretasi Data dan Menarik Kesimpulan

Interpretasi dan menarik kesimpulan merupakan langkah terakhir dalam teknik analisis data, data yang disajikan diinterpretasi berdasarkan wawasan dan ide dalam ilmu sosial dengan maksud meninjau kembali data yang telah diproses sehingga memberikan makna. Dalam penarikan kesimpulan peneliti menghubungkan data yang telah diinterpretasi dengan literatur penelitian yang lebih luas, tidak hanya itu peneliti turut membandingkan kesesuaian pernyataan informan dengan makna yang terkandung dalam konsep dasar dalam penelitian, sehingga peneliti dapat menarik secara objektif terhadap data yang diperoleh di lapangan.

1.9. Sistematika Tesis

Dalam sistematika penulisan peneliti menjabarkan penelitian berbentuk Bab maupun Sub Bab sebagai upaya pengelompokan untuk mempermudah memahami hasil dari penelitian, sistematika penulisan meliputi:

Bab I diawali pendahuluan berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan kajian literatur. Kajian literatur yang diambil peneliti tidak saja mengumpulkan berbagai literatur dengan isu yang sama melainkan peneliti dapat menemukan nilai baru dengan menemukan titik perbedaan, selain itu terdapat kerangka teori, definisi konseptual. Dalam metode penelitian diuraikan terkait tipe penelitian, ruang lingkup penelitian, jenis dan sumber data. Selanjutnya terdapat instrumen penelitian, teknik pengumpulan data dan terakhir ialah sistematika penulisan. Pada Bab I secara khusus peneliti menjelaskan terkait metode penelitian sebagai pijakan awal dalam melakukan penelitian berikutnya.

Bab II peneliti memaparkan gambaran umum Konfederasi Serikat Pekerja yang menjadi objek dari penelitian, pada Bab II peneliti membahas tentang profile Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia meliputi sejarah, visi, misi dan haluan konfederasi, struktur kepengurusan dan anggota organisasi konfederasi.

Bab III peneliti memaparkan hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan meliputi ideologi Konfederasi Serikat Pekerja, strategi gerakan, pola gerakan, posisi konfederasi terhadap kekuasaan dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan perjuangan Konfederasi Serikat Pekerja

Bab IV, peneliti melakukan analisis mendalam terkait hasil penelitian yang meliputi ideologi Konfederasi Serikat Pekerja, strategi gerakan, pola gerakan, posisi Konfederasi Serikat Pekerja terhadap kekuasaan dan melakukan analisis mendalam terkait keberhasilan dan kegagalan perjuangan Konfederasi Serikat Pekerja.

Bab V, peneliti memberikan simpulan dan saran dalam penelitian yang mencakup pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian, poin-poin temuan dalam penelitian meliputi ideologi, strategi gerakan, pola perjuangan, posisi konfederasi terhadap kekuasaan dan refleksi keberhasilan dan kegagalan perjuangan Konfederasi Serikat Pekerja, tidak lupa peneliti turut memberikan saran kepada peneliti selanjutnya yang hendak meneliti terkait gerakan buruh.